KETIMPANGAN GENDER DALAM PENDIDIKAN

Chairani Astina

Dosen UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Abstrak

Pendidikan yang dapat mencerdaskan bangsa adalah pendidikan yang terbebas dari unsur diskriminasi gender. Laki-laki dan perempuan, sama-sama berhak memperoleh pendidikan tinggi, sama-sama berhak mengabdikan ilmu yang telah diperolehnya untuk kebaikan manusia, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun diluar rumah tangganya.

Meskipun saat ini sudah banyak perempuan yang mengenyam pendidikan akan tetapi mereka tetap belum mendapatkan kesempatan sepenuhnya untuk mengembangkan kualitas diri mereka dengan cara meneruskan pendidikan mereka kejenjang yang lebih tinggi lagi, dikarenakan beberapa faktor yaitu : ekonomi, sosial, fasilitas pendidikan dan pembagian peranan menurut jenis kelamin. Dan ada pula beberapa ketimpangan yang terjadi dalam pendidikan yaitu: 1) kurikulum yang bias gender, 2) kebijakan sekolah yang diskriminatif, dan 3) stigmatisasi disiplin ilmu. Untuk mengembangkan masyarakat, ada beberapa prinsip yang harus ditumbuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan emansipatori : Pemerataan atau kesetaraan, berkelanjutan, produktifitas, dan pemberdayaan dari setiap individu.

Adapun tujuan dari pendidikan berperspektif gender di antaranya: mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, kewajiban yang sama, dan persamaan kedudukan dan peran. Jika ini dapat direalisasikan maka kita bisa mengurangi terjadinya ketimpangan-ketimpangan gender yang ada dalam pendidikan.
Kata kunci : Ketimpangan Gender, Pendidikan.

Abstract

Education can achieve the nation is free from gender discrimination element. Men and women are equally entitled to obtain higher education, are equally entitled to devote knowledge that has been gained for the benefit of man, both within the household and outside the household.

Although it's been a lot of women who get an education but they still have not gotten a chance to fully develop the qualities themselves in a way to continue their education to a higher level again, due to several factors: economic, social, educational facilities and the distribution of roles according to the types of genitals. And there are also some inequality in education, namely: 1) gender-biased curriculum, 2) discriminatory school policy, and 3) the stigmatization of disciplines. To develop a community, there are several principles that must be grown in the administration of emancipatory education: Equity or equality, sustainability, productivity and empowerment of each individual.

The purpose of education with a gender perspective include: equal access to education, the same obligations, and equality and roles. If this can be realized then we could reduce the gender inequalities that exist in education.

Keywords: Gender Inequality, Education

A. Latar Belakang

Pada masa Yunani, pendidikan dikonsepsikan sebagai proses penyiapan kehidupan manusia yang memilikitiga tipe sebagai masyarakat yang mewujudkan Negara ideal, yaitu: 1) Manusia sebagai pemikir dan pengatur Negara, 2) Manusia sebagai kesatria dan pengaman Negara, 3) Manusia sebagai pengusaha dan penjamin kemakmuran serta kesejahteraan Negara dengan segenap warganya.

Pendidikan yang dapat mencerdaskan bangsa adalah pendidikan yang terbebas dari unsur diskriminasi gender. Laki-laki dan perempuan, sama-sama berhak memperoleh pendidikan tinggi, sama-sama berhak mengabdikan ilmu yang telah diperolehnya untuk kebaikan manusia, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun diluar rumah tangganya¹.

Perbedaan prestasi yang dicapai laki-laki dan perempuan sangat berkaitan erat dengan lingkungan yang dimodifikasi secara berbeda. Andaikan lingkungan sejak semula memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mahir di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti yang dilakukan pada anak laki-laki pada umumnya, tentu perempuan tidak akan mengalami ketertinggalan.²

Sebagai mana ada pepatah yang sering kita dengar *“wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya baik maka negaranya akan baik, apabila wanitanya rusak maka negara itu akan rusak pula”*. Dari pepatah ini bisa kita simpulkan bahwa betapa besarnya pengaruh seorang wanita dalam kehidupan ini, jika seorang wanita baik, pintar, dan berakhlak mulia maka mereka akan bisa mewujudkan para pemimpin yang hebat untuk suatu negara. Dengan ini mestinya kita sudah bisa mencermati betapa pentingnya bagi seorang wanita untuk mendapatkan pendidikan sama dengan hal layaknya para laki-laki. Apa lagi kita juga sering mendengarkan ungkapan yang sangat populer bahwasanya *“Dibalik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat”*, dari makna yang tersirat dalam ungkapan tersebut bahwasanya antara perempuan dan laki-laki mereka saling melengkapi antara satu sama lainnya. Seorang perempuan bisa menjadi hebat ketika dia bisa menghebatkan laki-laki yang ada dalam kehidupannya, baik itu kakek, ayah, kakak, adik dan anak. Begitu juga dengan laki-laki mereka bisa meraih suatu kesuksesan dan dikatakan hebat itupun juga tidak luput dari peran perempuan yang ada dalam kehidupannya, baik itu nenek, ibu, kakak dan adik.

¹ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam berbagai perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), hal. 145

² Ibid,hal.105.

Seiring perjalanan sejarah, kaum perempuan telah banyak mengalami berbagai erosi, mulai dari kepribadian, akhlaq, bahkan aqidah. Dan itu semua tidak luput dari pengetahuan yang mereka miliki melalui jenjang pendidikan, sebagaimana yang selama ini kita ketahui pendidikan pada dahulunya lebih diprioritaskan bagi kaum laki-laki saja, sementara kaum perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi baik karena alasan ekonomi maupun anggapan tugas domestic perempuan.

Fenomena subordinasi perempuan dalam pendidikan Indonesia menyaratkan suatu revolusi cultural. Yakni menghancurkan mitos dan segala bentuk pembekuan anggapan yang menyatakan bahwa subordinasi perempuan itu alami (natural). Upaya penyadaran bisa dilakukan melalui pendidikan seperti yang pernah dilakukan R.A. Kartini. Salah satu yang diperjuangkan pada waktu itu adalah kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki³.

A. Pengertian Pendidikan dan Tujuannya

1. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan dari beragam perspektif para tokoh pendidikan yang ada pada buku *Dasar-Dasar Kependidikan* (Hamdani, 2011), dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah system yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat⁴.

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dan sekaligus merupakan pedoman yang member arah bagi segala aktivitas yang dillakukan. Salah satu tujuan pendidikan dalam islam adalah “mengembangkan manusia yang baik yang beribadah dan tunduk kepada Allah serta mensucikan diri dari dosa”⁵. Menurut Zakiyah Drajat ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu :

³ Agnes Widanti, Fatimah Usman, *Belajar Gender, analisis : mengurai ketimpangan gender dalam realitas masyarakat*, (Semarang : JGJ PMII Jateng, 2005), hal. 45.

⁴ Hamdani, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hal.13-21.

⁵ Hery Noer Aly. Munzier, Et, al, *Watak pendidikan islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), hal. 152.

- a. Tujuan umum yaitu tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran, atau dengan cara lain.
- b. Tujuan akhir yaitu insane kamil yang akan menghadap Tuhannya, merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan islam.
- c. Tujuan sementara yaitu tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
- d. Tujuan operasional yaitu tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu⁶.

B. Pengertian Gender Dan Kesetaraannya dalam Pendidikan

Menurut para ahli, gender didefinisikan sebagai isu perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan. Gender telah lantang digemborkan dimana-mana. Sebenarnya apakah gender itu? Gender merupakan atribut yang disematkan pada seseorang, dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada laki-laki atau perempuan. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat untuk melakukan peranan terbaik sebagai laki-laki atau perempuan. Karena gender merupakan bentuk sosial (pengalaman masyarakat), maka penempatan gender dari waktu ke waktu selalu berubah. Gender tidak bersifat universal, artinya antara masyarakat satu dengan yang lain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam memahami gender. Perbedaan ini disebabkan settingsosiohistoris masyarakat satu dan lainnya tidak sama. Peran gender juga dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena gender bukan kodrat Tuhan (hukum Tuhan) melainkan bentuk sosial⁷.

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sini muncullah doktrin

⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.29-33

⁷ Agnes Widanti, Fatimah Usman, *Belajar Gender, analisis : mengukur ketimpangan gender dalam realitas masyarakat*, hal.3.

ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan⁸. Ketidaksetaraan tersebut diantaranya adalah:

1. Marginalisasi terhadap perempuan

Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan kepinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin.

2. Stereotip masyarakat terhadap perempuan

Pandangan stereotip masyarakat, yakni pembakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat keluar dari kodrat yang telah ada.

3. Subordinasi terhadap perempuan

Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu, nomor dua, sosok bayangan, dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Laki-laki menganggap perempuan tidak mampu berpikir seperti ukuran mereka, sehingga mereka selalu khawatir apabila memberi pekerjaan berat kepada perempuan.

4. Beban ganda terhadap perempuan

Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan lebih lama pengerjaannya bila diberikan kepada laki-laki, karena perempuan yang bekerja disektor publik masih memiliki tanggungjawab pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat diserahkan kepada pembantu rumah tangga sekalipun pembantu rumah tangga sama-sama perempuan.

5. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan psikis, seperti pelecehan, permintaan hubungan seks ditempat umum, senda gurau yang melecehkan seks perempuan. Dan kekerasan fisik, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan terhadap perempuan dan lain sebagainya⁹.

Sementara itu dalam pendidikan dasar persamaan pendidikan menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Sebagaimana Athiyah, Wardiman Djojonegoro menyatakan bahwa ciri pendidikan

⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak, 1994, hlm. 55.

⁹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, Magelang: Indonesia Tera, 2004, hlm. XX-XXIV.

kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dalam kerangka ini, pendidikan diperuntukkan untuk semua, minimal sampai pendidikan dasar. Sebab manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat yang tersingkir dari kebijakan kependidikan berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan¹⁰.

C. Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan

1. Kurikulum yang Bias Gender

Terjadinya distorsi pedagogis yang ditimbulkan media masa juga tuntutan pemerintah dan industri swasta. Untuk tehnik pendidikan menengah dan tinggi juga mempresentasikan hal serupa yakni nilai dan kurikulum yang bias gender. Sebenarnya masalah nilai materi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kurikulum agar tidak bias. Kurikulum yang bias gender didalamnya memuat dua hal, yakni :

- Kurikulum pendidikan secara teori dalam materi yang diberikan
- Kurikulum yang diberikan dalam bentuk kegiatan atau praktek.

2. Kebijakan Sekolah yang Diskriminatif

Kebijakan-kebijakan yang diambil penguasa pendidikan terhadap siswa laki-laki dan perempuan sering merugikan salah satunya. Tetapi yang paling dirugikan adalah siswa perempuan, semis ala sudut pandang yang membedakan peta perempuan dan laki-laki.

Pertama, bidang studi yang diterima laki-laki lebih pada alokasi waktu dan kesempatan yang leluasa. Hal ini dapat kita lihat dalam pemberian kesempatan masuk perguruan tinggi jurusan tertentu, seperti teknik dan otomotif. Dengan kesempatan yang berbeda tentu saja buku-buku dan materi laki-laki lebih beragam. Sementara siswi dianggap telah cukup dengan menguasai masalah-masalah sehingga tidak aneh jika laki-laki kelak dapat mengembangkan diri untuk menjadi pemimpin.

Kedua, keberadaan diluar (masyarakat dan lingkungan) kurang mendapat tempat dan sambutan, sementara itu pula peraturan dan kebijakan yang ditujukan kepada perempuan telah

¹⁰ Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Alpha, 2005, hlm: 30.

membatasi kiprahnya diluar sehingga mereka kekurangan informasi dan kegiatan¹¹.

Pembelajaran yang selama ini berlangsung dilembaga-lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah, disinyalir sebagian kalangan masih belum berwawasan gender, karena belum dapat menggali dan mengembangkan semua talenta peserta didik, terutama mereka yang perempuan dan kaum *dhu'afa*. Hal ini karena : (1) masih ada anggapan bahwa prinsip utama pendidikan terletak pada usaha para pendidik, orang tua, atau peserta didik untuk selalu mentaati setiap peraturan tanpa *reserfe*, (2) ada mitos bahwa perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki, betapapun mereka mendapat pendidikan seperti laki-laki.

Perlakuan diskriminasi dalam proses pembelajaran berakar dari paradigma konvensional yang memandang anak perempuan lebih rendah dari anak laki-laki dalam berbagai partisipasi kehidupan. Paradigma yang telah terkontruksi secara kultural turun temurun ini diperkuat oleh usaha-usaha untuk mengarahkan laki-laki maskulin dan anak perempuan menjadi feminim, yang kemudian mempengaruhi perkembangan masing-masing anak perempuan dan anak laki-laki menjadi berbeda. Sosialisasi ini terjadi sejak dini melalui instansi keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.¹²

3. Stigmatisasi disiplin Ilmu

Variasi-variasi peranan dimainkan laki-laki dan perempuan adalah produk dari norma dan nilai-nilai diluar dari individu yang mengajari. Mereka sejak muda belia sudah menerima refleksi perbedaan gender, sehingga stigmatisasi keberbedaan disiplin ilmu menjadi budaya dimasyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi terhadap pendidikan perempuan. Pendiskriminasian tersebut disebabkan beberapa factor, sebagai berikut :

a. Factor Ekonomi

Para orang tua lebih memberikan kesempatan pada anak laki-laki karena lemahnya ekonomi. Ketersedian uang dan waktu untuk mengejar cita-cita mengakses pendidikan tinggi, pemuda ketika ditanya mengapa tidak melanjutkan keperguruan tinggi, mereka menjawab "*cannot afford it*" ini disebabkan karena

¹¹ Agnes Widanti, Fatimah Usman, *Belajar Gender, analisis : mengurai ketimpangan gender dalam realitas masyarakat*. Hal.46-47.

¹² Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam berbagai perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), hal. 121-122.

orang tua harus menyediakan biaya lebih banyak dibanding untuk anak laki-laki melanjutkan pendidikan.

b. Factor fasilitas pendidikan

Jumlah lembaga pendidikan dipedesaan kurang memadai. Baik itu fasilitas umum, khusus ataupun pendukung.

c. Factor social

Awal sosialisasi untuk mandiri antara anak perempuan dan laki-laki yang dibedakan oleh orang tua dan keluarga, mengakibatkan mereka tumbuh berbeda, termasuk dalam gaya berfikirnya. Perkembangan seorang anak sangat ditentukan pertama sekali oleh lingkungan dimana anak lahir, diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Adanya kebudayaan (adat) yang menganggap bahwa anak perempuan telah cukup menguasai masalah-masalah pokok dalam pendidikan.

d. Factor pembagian peran menurut jenis kelamin.

Selama ini banyak orang beranggapan bahwa kepribadian perempuan dan laki-laki sangat berbeda dan tidak ada kesamaan yang dapat menjembatani keduanya. Anggapan ini menimbulkan banyak orang yang mengalami penderitaan psikis karena mereka terikat untuk berperan sebagai perempuan saja dan laki-laki saja, seperti yang telah ditentukan oleh orang tua melalui perlakuan yang berbeda sejak kecil dikeluarga.

Para orang tua cenderung menilai bahwa anak perempuan lebih lemah (pemahamannya dalam pelajaran) dibandingkan anak laki-laki. Akibat dari factor-faktor diatas, maka timbul persoalan lain, diantaranya :

1. Pendorinasian laki-laki dalam pengambilan keputusan.
2. Karena pendidikan perempuan kurang memadai dan kurang keterampilan maka banyak istri yang hidupnya tergantung pada suami cenderung menerapkan system patriarkhi.
3. Masih tingginya tingkat pernikahan dibawah umur terutama perempuan, akibatnya banyak terjadi kawin-cerai dibawah umur karena usia mereka menunjukkan ketidak siapan untuk menikah.
4. Karena pendidikan yang kurang, maka mereka kurang mampu membina keluarga secara psikologis dan kesehatan keluarga¹³.

¹³ Ibid, hal.47.

D. Pendidikan Memandang Gender

Dalam deklarasi hak-hak asasi manusia pasal 26 dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran... Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia.

Dari deklarasi diatas , sesungguhnya pendidikan tidak hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsure utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi social, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender dimasyarakat. Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman, yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketaqwaan yang kokoh, mengenali, menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan, dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berfikir secara analitik, terbuka pada hal-hal baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian social yang tinggi, dan bisa meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapatkan kualifikasi tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya¹⁴.

Seperti dalam prinsip pendidikan emansipatori, yang mana sepatutnya memperlakukan masyarakat : laki-laki, perempuan, kaya atau miskin untuk berperan setara dan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dan memperluas pilihan masyarakat (Streeten, 1995). Perbaikan kondisi dan perluasan pilihan itu diharapkan dapat memberikan akses yang sama bagi semua orang keberbagai kesempatan untuk memberbesar pilihan hidup mereka, dapat memberikan suatu kerangka untuk memahami bagaimana system ekonomi, social, lingkungan, dan pemerintah berinteraksi , serta mengkaji *trade-offs* diantara berbagai subsistem itu, serta dapat mengoptimalkan produktivitasnya melalui investasi dalam pembangunan ekonomi makro menuju peraihan potensinya yang optimal. Atas dasar itu masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri secara otonom.

Untuk mengembangkan masyarakat, ada beberapa prinsip yang harus ditumbuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan emansipatori :

1. Pemerataan atau keselaraan (*equity*), prinsip ini mengandung makna suatu kesamaan dan kesetaraan dalam pemanfaatan

¹⁴ Moh.Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal.49.

setiap kesempatan. Dalam bidang pendidikan kesempatan harus diberikan yang sama kepada rakyat kecil, kaum perempuan, kelompok dewasa dan tua, masyarakat ditempat terpencil, suku terasing, etnis minoritas dan yang lainnya.

2. Berkelanjutan (*sustainability*), prinsip dasar pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environment and Development* (1987) bahwa generasi sekarang harus memenuhi kebutuhannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi-generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan emansipasi untuk masyarakat harus diselenggarakan secara berkelanjutan antar generasi.
3. Produktivitas (*productivity*), pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakatnya melalui investasi dalam pembangunan manusia yang memungkinkan manusia meraih potensi optimalnya.
4. Pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti memberikan kesempatan kepada individu untuk berprestasi aktif dalam setiap ikhtiar pembangunan sekaligus upaya pembelajaran masyarakat dalam proses pengembangan diri, memberikan kesempatan pada masing-masing warga masyarakat untuk berkembang sesuai dengan daya kemampuannya¹⁵.

Dengan demikian, departemen pendidikan melakukan perubahan pada kurikulum dan rupanya sudah terakomodasi dalam kurikulum 2004 tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam bahan ajar terutama isu gender meskipun pada kenyataannya masih membawa dampak bias gender dalam masyarakat yang masih berakibat pada kurang optimalnya sumberdaya manusia yang optimal yang unggul disegala bidang tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, pendidikan seharusnya memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga, melainkan juga masalah pertanian, dan keterampilan lainnya. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai amat besar dan merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan sesungguhnya¹⁶.

¹⁵ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam berbagai perspektif*, hal. 171-177.

¹⁶ Daryo Sumanto, *Isu Gender dalam Bahan Ajar*, (Jakarta: Akses Internet, 2004), hal.1-49.

E. Tujuan Pendidikan Berperspektif gender

Tujuan dari pendidikan berperspektif gender di antaranya:

1. Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, misalnya, anak pria dan wanita mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidaklah adil, jika dalam era global sekarang ini menomorduakan pendidikan bagi wanita, apalagi kalau anak wanita mempunyai kemampuan. Pemikiran yang memandang bahwa wanita merupakan tenaga kerja di sektor domestik (pekerjaan urusan rumah tangga) sehingga tidak perlu diberikan pendidikan formal yang lebih tinggi, merupakan pemikiran yang keliru.
2. Kewajiban yang sama, umpamanya seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Sejalan dengan hadits nabi "menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan".
3. Persamaan kedudukan dan peranan, contohnya baik pria maupun wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. kedudukan pria dan wanita sebagai subjek pembangunan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Akhirnya berkaitan dengan persamaan kesempatan¹⁷.

Dapat diambil contoh, jika ada dua orang guru yakni seorang pria dan seorang wanita sama-sama memenuhi syarat, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan sebagai Dekan atau Ka.Prodi. Wanita tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang wanita. Pandangan bahwa pemimpin itu harus seorang pria merupakan pandangan yang keliru dan perlu ditinggalkan. Pendidikan berperspektif gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal, instansi pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lain-lain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga. Pembangunan di bidang pendidikan misalnya, kalau perencanaannya, pelaksanaannya atau pelayanannya, pemantauannya dan evaluasinya sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa pendidikan yang baik dapat dinikmati oleh baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula pembangunan di bidang-bidang yang lainnya.

¹⁷ Modul, *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Sektor Pendidikan*, Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas bekerja sama dengan CIDA melalui *Women's Support Project Phase II*. hlm. 29.

F. Kesimpulan

Sebagaimana yang kita ketahui pendidikan adalah suatu kebutuhan pokok manusia, baik itu pendidikan formal ataupun informal, pendidikan sangat berperan penting bagi seorang manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena manusia sudah berhak mendapatkan pendidikan semenjak dia didalam kandungan sang ibu, untuk bekal mereka kelak dalam menjalani kehidupan. Jadi sangatlah tidak adil jika dalam pendidikan adanya pendiskriminasian terhadap salah satu pihak yang akan dirugikan pada masyarakat dalam kesempatan untuk meraih berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang sesuai dengan minat individu. Maka dari itu, dengan adanya kesetaraan gender dalam pendidikan hendaknya bisa membantu para partisipan dalam dunia pendidikan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seoptimal mungkin, sehingga tidak adanya keterbelakangan, akhlaq, pengetahuan, pola berfikir yang mengakibatkan banyaknya ketimpangan-ketimpangan gender dalam pendidikan.

Melalui pendidikan juga bisa dijadikan sebagai wasilah untuk merobah mitos yang telah mendarah daging didalam kehidupan masyarakat kita tentang gender. Baik itu dalam pengembangak kurikulum yang ada, dan dalam proses belajar mengajar ataupun materi dengan contoh kegiatan praktek yang begitu membedakan kemampuan mereka antara siswa laki-laki dan perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Hery Noer. Munzier, Et, al, *Watak pendidikan islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 2003.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak, 1994.
- Hamdani, *Dasar-dasar Kependidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Modul, *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Sektor Pendidikan*, Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas bekerja sama dengan CIDA melalui *Women's Support Project Phase II*. hlm. 29.
- Murniati, A. Nunuk P., *Getar Gender*, Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Purwati, Eni dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Alpha, 2005.
- Nurhayati, Eti, *Psikologi Perempuan dalam berbagai perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Roqib, Moh., *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media, 2003..
- Sumanto, Daryo, *Isu Gender dalam Bahan Ajar*, Jakarta: Akses Internet, 2004.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widanti, Agnes, Fatimah Usman, *Belajar Gender, analisis : mengurai ketimpangan gender dalam realitas masyarakat*, Semarang : JGJ PMII Jateng, 2005.